

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN SILPA  
TERHADAP BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :**

**TRI SURYANTO**

**B300 170 032**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN SILPA TERHADAP**

**BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**TRI SURYANTO**  
**B300170032**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Siti Retno Faridatussalam, S.E., M.M**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN SILPA TERHADAP  
BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH**

**OLEH**

**TRI SURYANTO  
B300170032**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Siti Retno Faridatussalam, S.E., M.M  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Muhammad Anas, S.E., M.Si.  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Siti Aisyah, S.E., M.Si.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(*Siti Retno Faridatussalam*)  
(*Muhammad Anas*)  
(*Siti Aisyah*)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si.  
NIK/NIP. 82970217 1986 031 001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2021

Penulis



**TRI SURYANTO**

**B300170032**

## **PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL DI JAWA TENGAH**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh dana perimbangan, SiLPA, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal kota di Jawa Tengah tahun 2013-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Analisis ekonometrika data panel digunakan sebagai alat penelitian. Berdasarkan hasil regresi data panel, ditemukan bahwa dana perimbangan (DPER) dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDYS) tidak berpengaruh terhadap belanja modal kota di Jawa Tengah tahun 2013-2020.

**Kata kunci:** belanja modal (BM), pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DPER), lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDYS), SiLPA.

### **Abstract**

This study aims to estimate the effect of balancing funds, SiLPA, other legitimate local revenues, and local revenue on capital expenditures for cities in Central Java in 2013-2020. This research is a quantitative research with a descriptive design. Econometric analysis of panel data was used as a research tool. Based on the results of panel data regression, it was found that the balancing fund (DPER) and SiLPA had a positive effect on capital expenditure, while local revenue (PAD) and other legitimate regional income (LLPDYS) had no effect on city capital expenditure in Central Java in 2013-2020.

**Keywords:** capital expenditure, local generated revenue, balancing fund, other legitimate regional income, SiLPA.

## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sedangkan wujud pelaksanaan otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatannya, yang sebelumnya diatur oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan jumlah yang sangat signifikan (Huda and Sumiati, 2019). Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak

kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah juga berdampak pada optimalnya potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif seperti pembelian tanah, pembangunan jalan dan pembangunan irigasi. Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah secara efektif dan efisien agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda untuk mendanai belanja daerahnya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah, maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan ke daerah yang sumber dananya dari APBN. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi HASIL (DBH) untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari data *time series* dengan rentan waktu pengamatan dari tahun 2013 hingga 2020 dan data *cross section* yang meliputi data belanja modal, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan silpa dengan wilayah kota di Jawa Tengah. Untuk data dari variabel di atas diperoleh dari situs resmi (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>) dan laporan APBD setiap kota di Jawa Tengah. Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 . Hasil Estimasi *Random Effect Model* (REM)

---

$$\text{BM}_{it} = -12.45807 + 0.280270 \text{ PAD}_{it} + 0.936603 \text{ D\_PER}_{it} - 0.088239 \text{ LPPYS}_{it} + 0.308620 \text{ SiLPA}_{it}$$

---

(0.0365)	(0.2081)	(0.0132)**	(0.4011)
----------	----------	------------	----------

---

(0.0001)\*

---

$$R^2 = 0.776781 ; DW = 1.632207 ; F\text{-stat} = 37.40889 ; \text{Prob F-stat} = 0.000000$$

---

**Keterangan :** \*Signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,05$ ; \*\*\* Signifikan pada  $\alpha = 0,10$ ; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

### 3.1. Uji Eksistensi Model (Uji F)

Bedasarkan tabel 1. diketahui nilai signifikansi empirik statistik F pada estimasi Uji REM memiliki nilai 0,000 ( $<0,001$ ) maka  $H_0$  ditolak. Kesimpulan dari model yang dipakai ini adalah eksis.

### 3.2. Interpretasi Koefisien Determinan $R^2$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari Tabel 1. Terlihat nilai  $R^2$  pada model *Random Effect Model* (REM) sebesar 0.776781 artinya 77,67% variasi variabel Indeks Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan SiLPA. Sisanya 22,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian

Tabel 2. Effect Cross section

No	Kota	Effect	konstanta
1.	Kota Magelang	0.090031	-12,368039
2.	Kota Pekalongan	0.140277	-12,317793
3.	Kota Salatiga	-0.092740	-12,55081
4.	Kota Semarang	-0.029149	-12,487219
5.	Kota Surakarta	-0.010913	-12,468983
6.	Kota Tegal	-0.097507	-12,555577

### 3.3. Effect Cross section

Hasil penelitian menunjukkan konstanta nilai masing-masing konstanta kota di Jawa Tengah tahun 2013-2020. Nilai konstanta paling tinggi terdapat di Kota Pekalongan dengan nilai konstanta -12,317793 kemudian Kota Magelang dengan nilai -12,368039 selanjutnya Kota Surakarta dengan nilai -12,468983, selanjutnya Kota Semarang dengan nilai -12,487219, selanjutnya Kota Salatiga dengan nilai -12,55081 dan terakhir nilai konstanta paling rendah terdapat di Kota Tegal dengan nilai -12,555577

Dari nilai konstanta tersebut jika terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan SiLPA maka pengaruh terbesar terhadap Belanja Modal terdapat pada Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan terakhir pada Kota Tegal

Tabel 3. Hasil Uji *t*

Variabel	<i>t</i> -statistik	Prob. <i>t</i>	Kriteria	Kesimpulan
Log(PAD)	1.277910	0.2081	> 0,10	Tidak berpengaruh
Log(DP)	2.586171	0.0132	< 0,05	Berpengaruh pada $\alpha = 5\%$
Log(LLPYS)	-0.848117	0.4011	> 0,10	Tidak berpengaruh
Log(SiLPA)	4.471959	0.0001	<0,05	Berpengaruh pada $\alpha = 5\%$

### 3.4. Uji Validitas Pengaruh (Uji *t*)

Bedasarkan uji validasi pengaruh (uji *t*) yang telah diuraikan di atas ada dua variabel independen yang berpengaruh dan dua variabel independen yang tidak berpengaruh pada *Random Effect Model* (REM). Variabel yang berpengaruh terhadap Belanja Modal adalah Dana Perimbangan dan SiLPA, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh.



Variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar 0.936603. Pola hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal adalah logaritma-logaritma sehingga apabila Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0.936603%. Sebaliknya apabila Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 1% maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0.936603%.

Variabel SiLPA memiliki koefisien regresi sebesar 0.308620. Pola hubungan antara SiLPA dengan Belanja Modal adalah logaritma-logaritma, sehingga apabila SiLPA mengalami kenaikan sebesar 1% maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0.308620%. Sebaliknya apabila SiLPA mengalami penurunan sebesar 1% maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0.308620%.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian analisi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian analisis regresi data panel Pengaruh Dana Perimbangan, SiLPA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jawa Tengah tahun 2013-2020 maka Setelah dilakukan uji pemilihan model estimator dengan tiga model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effects Model* (REM). Maka *Random Effects Model* (REM) merupakan model terpilih
- b. Berdasarkan uji kebaikan model pada *Random Effects Model* (REM) terbukti bahwa model terestimasi eksis dengan nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0.776781, artinya 77,67% variasi perubahan Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Perimbangan, SiLPA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah. Sisanya 22,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian
- c. Hasil uji validasi pengaruh (Uji *t*) dapat diketahui bahwa variabel Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Sementara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jawa Tengah tahun 2013-2020.

- d. Hasil uji validasi pengaruh (Uji *t*) dapat diketahui bahwa variabel Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Jawa Tengah tahun 2013-2020.
- e. Hasil uji kebaikan model (Uji F diketahui nilai signifikansi empirik statistik F pada estimasi Uji REM memiliki nilai 0,000 ( $<0,001$ ) maka  $H_0$  ditolak. Kesimpulan dari model yang dipakai ini adalah eksis.
- f. Hasil *Effect* dan konstanta tertinggi dimiliki oleh Kota Pekalongan sebesar -12,317793 dan terendah terdapat di Kota Tegal sebesar -12,555577. Dari nilai konstanta tersebut jika terdapat perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan SiLPA maka pengaruh terbesar terhadap Belanja Modal terdapat pada Kota Pekalongan, diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan terakhir pada Kota Tegal.

#### **4.2. Saran**

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah agar lebih diintensifkan, terutama di sektor pajak dan retribusi daerah sehingga dapat diginnakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modalnya agar pembangunan daerah semakin baik dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sedangkan untuk pengelolaan Dana Perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik guna membiayai pengeluaran pemerintah pada sektor publik.
- b. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk pos Belanja Modal perlu diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan publik yang mampu mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Untuk daerah yang memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah yang masih tergolong sedikit, sebaiknya melakukan studi banding terhadap daerah

yang memiliki pendapatan dan belanja yang lebih tinggi, agar mendapatkan masukan mengenai pengelolaan anggaran agar menjadi lebih baik.

- d. Bagi akademisi yang akan melakukan penelitian mengenai Belanja Modal, diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel pendapatan yang lain agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih kompleks

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. Y. & N. Dirgantari. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015”. *Kompartemen XV*(1):42–56.
- Badan Pusat Statistik (2019).
- Badan Pusat Statistik BPS, (2015)
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (England) : John Wiley & Sons Ltd.
- Darise, N. (2006). "*Pengelolaan Keuangan Daerah*".Gorontalo: PT indeks Kelompok Gramedia .
- Desak, G. Y. A. S., P. Kepramareni & N. L. G. Novitasari. (2017). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali.” *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*; 9(1):15–29.
- djpk.kemenkeu.go.id(2020).
- Faradz, H. (2018). “Peranan Dana Perimbangan dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas.” *Authentica* 1(1).
- Fauzia, F.W & I. B. Riharjo (2017). “Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur).” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(6):1–20.
- Farel, R. (2015). " Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor" *Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2 No.2*.
- Febriana, I, S.(2015). ” Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur”. , *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 9
- Gujarati, Damodar. N. (2008). *Basic Econometric* (Singapore): McGraw-Hill inc.
- Huda, S. & A. Sumiati. (2019). “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.” *Jurnal Wahana Akuntansi* 14(1):85–100.

- Harianto, D. & A. P. Hadi. (2007). "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita". *Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar*.
- Kusnandar, & D. Siswanto. (2012). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal." *SNA XV Banjarmasin* (32):1–20.
- Napitu, A, E., V. J. Dillak. & S. A. Kurnia. (2018)." Pengaruh Dana Aloasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2003-2016." *Jurnal Library Telkom University* : Vol.5, No.3
- Nugraha, D. A (2018)."Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal (studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode (2015-2016)". *Skripsi UMS* 151(2):10–17.
- Hidayah. W., Maryono. & B. D. Bagana. (2019)" Faktor–faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal National Conerence on Applied Business*. 978-602-9026-29-0
- Nurdiwaty, D., B. Zaman., & E. Kristinawati. (2017). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur." *Jurnal Aplikasi Bisnis* 17(1):43–59.
- Nuzana, M. & I. B. Raharjo. (2016). "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Belanja Modal." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(10):1–22.
- Priambudi, W. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013" *Yogyakarta: Skripsi*, diajukan kepada FE UNY
- Santander, B & M. H. Yusuf, (2017). "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)".*Skripsi UB Malang* Vol. 87.
- Saputra, A, B. (2019). " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)".*Surakarta: Skripsi*, FEB UMS.
- Saragih, J P, (2003)."Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi". Edisi pertama. Jakarta: Gralia Indonesia
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sujarweni, V. W. (2020). "Metodologi penelitian bisnis & ekonomi." Yogyakarta: Pustaka baru press.
- UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (Yogyakarta).  
UPP STIM YKPN.

Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan  
Bisnis* (edisi pertama). Yogyakarta: Ekonisia.